

# 2 Politik & Hukum

Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan meminda QR Code  
▶ klik Kompas.id/politik

## PSU KUALA LUMPUR

### Potensi Kecurangan Besar, Pengawasan Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (08/3/2024). Potensi kecurangan besar menyisui dampak dari PSU yang bisa mengengaruhi raihan suara partai politik dan keterpilihan calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum diminta memperhatikan manajemen kerumunan. Hal ini penting karena 22 tempat pemungutan suara luar negeri (TSLN) di Gedung World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, akan digunakan untuk melayani 42.372 pemilih. Artinya, satu TSLN akan digunakan oleh 1.926 pemilih.

Wartawan Kompas, **Iqbal Basari** dari Kuala Lumpur, melaporkan, hingga Sabtu (9/3) pukul 18.00 waktu setempat, sejumlah pekerja sibuk mendirikan TSLN di Gedung WTC. Selain memasang partisi di antara TSLN, mereka juga memasang meja untuk bilik suara dan kotak suara.

Pada PSU kali ini, KPU menggunakan dua lantai untuk melayani pemilih. Para pemilih yang datang mengantar untuk verifikasi di lantai 4. Di area itu, petugas akan memverifikasi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) PSU Kuala Lumpur. Setelah dinyatakan masuk dalam DPT, pemilih diarahkan ke lantai 3 untuk menuju lokasi TSLN. Di satu ruangan itu, KPU mendirikan 22 TSLN. Lokasinya bersebelahan.

"Semua pembangunan TPS tuntas mulai ini dan logistik telah siap untuk melayani pemilih mulai pukul 08.00 besok pagi," kata anggota KPU, Idris Holiq, di Kuala Lumpur, kemarin.

Selain pemilih yang memilih di WTC, ada 19.845 pemilih lain yang bisa menggunakan hak pilihnya dengan metode kotak suara keliling (KSK) di 120 titik.

Anggota Bawaslu, Lolly Sahenty, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan protokol untuk mengawasi PSU, baik yang di TSLN maupun dengan metode KSK. Pengawasan lebih ketat ditempuh karena potensi kecurangan yang tinggi.

Dengan total pemilih dalam daftar pemilih PSU mencapai 62.217 orang, bisa signifikan mengengaruhi raihan suara partai atau calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang wilayahnya selain Jakarta. Pasca dari Jakarta Selatan juga mencakup pemilih di luar negeri.

"Hasil perolehan suara bisa menjadi dinamis setelah PSU di Kuala Lumpur," tutur Lolly Sahenty.

### Hasil perolehan suara bisa menjadi dinamis setelah PSU di Kuala Lumpur.

Lolly Sahenty

### Suara sementara caleg

Mengacu pada rapat pleno hasil rekapitulasi suara wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan oleh KPU DKI Jakarta, raihan suara di antara para calon anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta II tak terputus jauh, kecuali anggota DPR petahana dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, yang memperoleh suara tertinggi atau mencapai 205.545 suara.

Di peringkat kedua tertinggi Himmahul Alyah dari Partai Gerindra (68.445 suara), sedangkan di peringkat keempat Erlin Sotardjaja dari PDI Perjuangan (40.800 suara).

Selain itu, Lolly mengungkapkan dari dapil ini, hanya rajuk kursi DPR yang dipersebutkan dari dapil ini, antara pemilih yang memilih di WTC dan pemilih yang memilih di luar negeri. Sebab, jumlah pemilih yang menggunakan metode TPS saat PSU lebih banyak dibandingkan dengan suara di Kuala Lumpur, 11 Februari lalu.

Saat itu, 24.377 pemilih menggunakan hak pilih yang suara di Kuala Lumpur, 11 Februari lalu.

Sementara itu, 24.377 pemilih menggunakan hak pilih yang suara di Kuala Lumpur, 11 Februari lalu.

"Kemungkinan lokasi TPS akan sangat padat sehingga alur pemilih harus betul-betul disiapkan dengan baik," kata Lolly, Direktur Eksekutif Migrasi Care Wahyu Surolo mengingatkan agar KPU beserta jajarannya membuat manajemen pengelolaan kerumunan, karena PSU hanya dilaksanakan sepanjang 10 jam, yakni pukul 08.00-18.00 waktu setempat.

Selain itu, ia juga mengingatkan calon anggota legislatif mobilisasi pemilih untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai politik tertentu. Jika ada upaya mobilisasi untuk memilih hanya calon atau partai politik tertentu, jumlah suara mencapai puluhan ribu itu bisa berdampak signifikan.

Hal lain yang penting, menurut Wahyu, tim Panitia Pengawas Luar Negeri Kuala Lumpur dan Bawaslu diminta untuk meningkatkan pengawasan pada pemungutan suara dengan metode KSK. Sebab, jumlah pengawas kerap kali tidak memadai sehingga tak bisa mengawal saat petugas berkeliling. Tanpa ada pengawasan memadai, potensi kecurangan saat pemungutan suara KSK sangat besar. (DEA/WIL)

# Si Untung dari Putusan MK

Putusan MK soal ambang batas parlemen dianggap sebagian pengamat sebagai angin segar bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, ada dampak negatif yang perlu diantisipasi.

## Ninuk Mardiana Pambudy

Seorang perempuan calon anggota legislatif mengirim sejumlah pesan WhatsApp. Ia menyampaikan ketertarikannya melihat proses pemilu di lapangan. Dua hari menjelang waktu pencalonan pada 14 Februari 2024, dia terperangin melihat siaran dana dari calon-calon lain mengilir deras di daerah pemilihannya.

Dia lalu mengunggah sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini dalam mengemudikan daftar urut calon anggota legislatif (caleg) merugikan perempuan. Persaingan terbuka dan persaingan yang bukan tandingan bagi banyak perempuan caleg. Dia ingin sistem proporsional terbuka diubah supaya perempuan mendapat kesempatan bertanding dengan lebih setara, tanpa bermain uang.

Politik uang di dalam pemilihan umum adalah hal yang sudah melekat. Peraturan khusus mencegah praktik itu. Larangan politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 Ayat (1) Huruf j, misalnya, menyebutkan, "Penyelenggara, peserta, hingga tim kampanye dilarang menyalahgunakan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu."

Meskipun sistem proporsional terbuka berlaku untuk semua peserta, persaingan yang dihadapi situasi lebih rumit dibandingkan dengan lokasi-laki. Sumber dana, misalnya, dikaluskas menggunakan atau memiliki, tergantung dari suami atau keluarga.

Perempuan juga memerlukan izin suami atau keluarga untuk mengunjung calon pemilih yang lokasinya bisa berada jauh dan tempat tinggal caleg dan terpeleceh.

Kemudian pertarungan sudah dimulai dari internal partai untuk mendapatkan nomor urut topi meskipun berlaku sistem selang seling caleg perempuan dan laki-laki dalam setiap tiga urutan. Perlu menyediakan banyak waktu untuk aktif di dalam partai yang belum tentu disetujui oleh keluarga.

### Membuka peluang

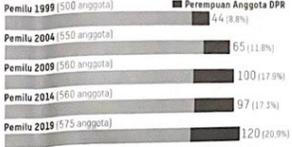
Situasi itu diperburuk dengan aturan selama ini, yaitu caleg yang mendapat suara cukup dapat duduk di lembaga legislatif hanya bila partai pendukungnya mendapat suara minimum 4 persen. Akibatnya, banyak perempuan caleg yang mendapat suara lebih dari cukup tidak dapat duduk di DPR.

Karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Kamis, 29 Februari 2024, bahwa angka ambang



Para hakim konstitusi berdiri dan bersipat meninggalkan ruangan sidang sesuai mengagel sejumlah agenda sidang putusan yang salah satunya membatalkan undang-undang mengenai ambang batas parlemen 4 persen dan memberlakukannya sejak Pemilu 2029 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

### Jumlah Perempuan Anggota DPR Pascareformasi



### Putusan MK Terkait Ambang Batas Parlemen (29/2/2024)

- Ketertarikan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara rasional yang diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip keadilan rakyat, keadilan pemilu, dan mengangur kesempatan "kultur" bagi perempuan di konstitusi.
- Ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk dibatalkan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.
- MK meminta pemerintah undang-undang revisi ambang batas.
- DPR meminta pemerintah undang-undang memperjelas desain etik digunakan secara berkeadilan, menjadi proporsionalitas sistem pemilu proporsional, pemberdayaan partai, selektif sebelum dimulainya tahapan pemungutan suara Pemilu 2029 dan melibatkan semua kalangan termasuk partai peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.



Sumber: Balai Besar Sahli dan Kantor Mahkamah, DPR, UU, dan Konstitusi

batas parlemen harus diubah sejak Pemilu 2029 oleh pemerintah undang-undang, yakni pemerintahan dan DPR, dianggap sebagai pengantapan sebagai perempuan di parlemen. MK menyimpulkan bahwa mengubah rumus untuk menentukan besaran persentase diserahkan kepada pemerintah dan DPR.

Pengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pembina Per-Demokrasi (Perudem), Titi Angraini, mendukung keputusan MK sehubungan berarti memantapkan atau menghapus ambang batas 4 persen.

### Perempuan pengawal oleh parpol

dalam kerja-kerja pemungutan suara caleg perempuan agar tidak terpeleceh pada praktik transaksional dan politik berbiaya tinggi. Banyak perempuan caleg asal direktur mengungkap tawaran pendanaan calon hanya untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan.

Pengawasan hukum dan akuntabilitas data politik harus diperbaiki meskipun spa pun pilihan sistemnya. Tanpa itu, ekosistem yang tidak sehat bagi perempuan di politik akan bertahan. Sistem dan model keterwakilan pemilu perlu direseksikan, belajar kampanye lebih dilatih, dan ada efek jera bagi politik jual-beli suara melalui penasehat hukum yang efektif.

Penelitian oleh Visiting Fellow, Department of Political and Social Change, Australian National University, Stephen Sherlock, yang dipaparkan dalam seminar pada Rabu (28/2/2024) dari Canberra menyortir situasi perempuan dalam politik di Indonesia. Stephen melihat data kuantitatif dari lima kali pemilu sejak tahun 1999 dan melihat dampak penerapan kebijakan kuota bagi keterwakilan perempuan di DPR.

Stephen menyebut, Indonesia mengotisi arah perkembangan internasional dalam keterwakilan perempuan. Penerapan kuota, termasuk kuota, sangat mempengaruhi perempuan dalam daftar caleg yang memperlebar peluang keterwakilan, efektif meningkatkan keterwakilan perempuan dalam perjalanan waktu. Kenakikan yang menang bertaruh, tidak dikritik kenakan dalam jumlah nyata suara untuk perempuan.

### Terjebak

Sistem proporsional terbuka pada saat ini memberi perlindungan politik mengenai persaingan caleg terbuka di antarpol. Namun, ketika ideologi partai ditambah lenyapnya pengalihan hukum, menurut Titi, menyebabkan biaya politik menjadi dan masyarakat bahkan ikut menanti "amplop" dari caleg.

Meskipun sistem proporsional terbuka membuka peluang dalam politik dan berkompetisi bagi caleg, keberhasilannya di-

## nusantara BERITUR

# Laut Pekat di Teluk Kao

Penulis: Rizka Amallah  
Ilustrasi: Regina Primality  
Penutur: Paman Gery (Instagram: @paman\_gerly)

Kirimkan naskah dongeng Anda ke nusantaraberitur@gmail.com  
Untuk info lebih lanjut kunjungi Facebook dan Instagram kami.

Harpi, anak raja mantis, yang punya suara sekeras itu." Nyare menjelaskan.

Nyare dan Haga berbalik. Mereka mencari sumber suara itu.

"Harpi? Kenapa kau mengungus kami? Kenapa! Kami tidak akan memalammu," Nyare berteriak.

Sekeer mantis berwarna cerah keluar dari balik terumbu karang. Ia tampak ragu-ragu dan berenang mendekati kedua hiu itu.

"Ehm... Sebenarnya aku sedang mendapat tugas menjaga kawasan ini. Para binatang laut sudah mengintip. Ada tumpukan minyak yang membuat laut menghitam. Itu akan sangat berbahaya untuk kalian. Meskipun, sebenarnya aku tak suka pada kalian para pemangsa, tapi aku tak mau kalian celaka." Harpi menjelaskan dengan terburu-buru.

Saat Harpi menarik napas setelah berbicara, Haga tiba-tiba bergerak cepat ke arahnya. Harpi tak sempat menghindar. "Ah, kali ini pasti jadi santapan hiu," pekik Harpi dalam hati.

Hiu penyu hitam itu dengan agam membuat gerakan membelit. Namun, ternyata Haga tak berniat melahap. "Terima kasih, Harpi. Karenamu kami selamat. Kami janji akan membayar utang budi kami akan melindungimu dan keluargamu dari serangan para predator," tukas Haga.

Nyare mengangguk. "Ya, meskipun predator, kami sangat menghargai kebaikannya." Harpi pun senyum lega. Mereka bertiga pun menjadi sahabat baik.

Nusantara Beritur @nusantaraberitur